

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI BIDANG EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN TONY ABBOTT

Rahmat Iskandar¹, Andreas Hari Kristiyanto², Rahma Atridayana Dwanti³, Saniyyah⁴,
Muhammad Nadhifa Ar Rafii⁵

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12450

Email: 2110412139@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2110412123@mahasiswa.upnvj.ac.id²;
2110412105@mahasiswa.upnvj.ac.id³; 2110412208@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴;
2110412190@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Submitted: 08-12-2024; Accepted: 14-01-2025; Published: 17-01-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara latar belakang kehidupan Tony Abbott dengan kebijakan luar negeri Australia di bidang ekonomi selama masa pemerintahannya (2013-2015) dengan pendekatan perspektif kepribadian pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana latar belakang dan kepribadian Abbott mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional Australia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder melalui studi literatur. Kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pencabutan pajak karbon dan pendanaan *Climate Council*, pencetusan *Direct Action Plan*, serta ekspor uranium ke India. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa Tony Abbott memiliki karakter konservatif dan pragmatis yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian nasional, dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan pendapatan negara. Namun, dalam perumusan tersebut, Abbott cenderung mengesampingkan isu kontemporer seperti perubahan iklim dan non-proliferasi senjata nuklir. Meskipun kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi, mereka juga memicu kritik terkait isu lingkungan dan hubungan diplomatik. Berdasarkan analisis terhadap fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama memimpin Australia sebagai perdana menteri, Tony Abbott memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat aktif-negatif. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh kepribadian pemimpin dalam pembentukan kebijakan luar negeri ekonomi, khususnya dalam konteks pemerintahan Abbott.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri; Kebijakan Ekonomi; Kepribadian Pemimpin

PENDAHULUAN

Australia merupakan salah satu negara maju dengan ekonomi yang kuat dan sangat terintegrasi ke dalam ekonomi global (*World Trade Organization*, 2020). Sebagai eksportir utama berbagai komoditas berkat kekayaan sumber daya alamnya, Australia memainkan peran signifikan dalam perdagangan internasional. Letak geografisnya yang strategis di kawasan Asia-Pasifik memperkuat posisinya sebagai mitra ekonomi potensial bagi negara-negara di kawasan tersebut. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer Australia memberikan peran penting

kepada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan domestik maupun luar negeri. Pada tahun 2013, Tony Abbott dari Partai Liberal terpilih sebagai Perdana Menteri ke-28 Australia. Selama masa jabatannya, Abbott dikenal dengan gaya kepemimpinan konservatif yang sering kali kontroversial. Kebijakannya, baik di tingkat domestik maupun internasional, kerap menimbulkan perdebatan publik.

Situasi yang dibentuk oleh kepemimpinan Abbott dalam kebijakan luar negeri di bidang ekonomi tidak lepas dari adanya polemik. Polemik ekonomi yang dihasilkan dapat mengantarkan kepada situasi yang tidak diinginkan atau tidak

ideal oleh masyarakat Australia. Salah satu kebijakan yang dikecam seperti pemotongan anggaran negara pada APBN 2014 sebagai bentuk dari defisitnya ekonomi dan keuangan pada tahun tersebut. Pemotongan yang dilakukan tersebut terjadi di beberapa sektor seperti Lembaga *Environmental Defenders Offices* (EDO) dengan pemotongan dana hampir 10 juta dolar (Rp 120 miliar), akibat dari pemotongan tersebut EDO diberlakukan pemberhentian dana oleh pemerintah kepada EDO pada 1 Juli 2014. Diberlakukan pengurangan dana untuk karbon sebesar 300 juta dolar melalui *Direct Action Plan*. Pemotongan anggaran berupa tunjangan juga dilakukan kepada ribuan tentara Australia yang ditugaskan di Timur Tengah dengan adanya penarikan pasukan dari Afghanistan. Ditutupnya lembaga pemerintahan sebanyak 36 lembaga akibat pemotongan anggaran tersebut serta bantuan untuk pembangunan bagi negara miskin dikurangi sebesar 4,5 miliar dolar (Rp 45 triliun) (Wardani, 2017).

Adanya dari kebijakan tersebut popularitas Abbott turun ke titik bawah pada Mei 2014 akibat pemotongan anggaran di berbagai lembaga dan penutupan lembaga pemerintah. Hal ini mengakibatkan menurunnya lapangan pekerjaan di Australia dan membentuk pengangguran yang cukup tinggi bagi para pekerja. Kebijakan ini juga menjadi protes masyarakat di berbagai wilayah Australia dalam merevitalisasi kebijakan tersebut. Dengan adanya protes masyarakat tersebut, akhirnya pemerintah menaikkan gaji personel militer menjadi 2% selama tiga tahun kedepan. Keputusan tersebut menjadi salah satu jalan keluar PM Abbott untuk mengurangi protes masyarakat yang ada (Wardani, 2017). Dalam hal tersebut situasi ideal yang diinginkan oleh masyarakat Australia adalah dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat, lembaga, bahkan militer dalam membuat rancangan anggaran perekonomian negara. Kebijakan yang dilakukan oleh Abbott mengenai pemotongan anggaran dapat menjadi dasar dari kebijakan luar negeri yang akan diambil kedepannya. Dengan demikian, situasi yang diharapkan masyarakat mengenai perekonomian yang stabil akan menjadi impian ideal Abbott tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat negaranya.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana latar belakang dan kepribadian Tony Abbott memengaruhi proses perumusan kebijakan ekonomi luar negeri Australia serta dampaknya

terhadap hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Adapun kebijakan luar negeri di bidang ekonomi yang dianalisis dalam artikel ini meliputi: i) pencabutan *Carbon Tax* dan pendanaan *Climate Council*; ii) pencetusan *Direct Action Plan*; dan iii) pembukaan ekspor uranium ke India.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kepribadian seorang pemimpin berperan signifikan dalam menentukan gaya dan keputusan politiknya. Dalam kasus Tony Abbott, gaya kepemimpinan aktif-negatif yang ambisius dan penuh kontrol diasumsikan menghasilkan kebijakan yang cenderung proteksionis dan kurang responsif terhadap opini publik, berbeda dengan kepemimpinan aktif-positif yang lebih terbuka terhadap pandangan masyarakat dan kerja sama internasional.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan tinjauan dan identifikasi yang menyeluruh terhadap perspektif “*Leadership Personality*” terhadap kebijakan luar negeri Australia di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Anthony John Abbott. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu hingga laman media dan berita yang akan menjadi sumber data yang penting untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan luar negeri ekonomi Australia dan Perdana Menteri Tony Abbott.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Kontroversial

Salah satu kebijakan perdana menteri Tony Abbott yang sangat kontroversial adalah kebijakan terkait *Carbon Tax* yang dimana saat pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, Australia memutuskan untuk mencabut kebijakan mekanisme carbon tax. *Carbon tax* (pajak karbon) adalah pajak sebesar AU\$23 yang dikenakan oleh pemerintah untuk setiap ton emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau korporasi dan banyak bukti yang membuktikan bahwa pajak karbon berperan besar dalam mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan dari Australia (Akkaya, 2020) dimana kebijakan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Partai Buruh pada tahun 2012 di bawah pemerintahan Julia Gillard. Terdapat

beberapa pro kontra terkait dicabutnya kebijakan pencabutan *Carbon Tax* ini, terutama bagi para aktivis lingkungan dimana keputusan tersebut dinilai sebagai aksi acuhnya Australia terkait tanggung jawab dalam mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim. Di sisi lain, pencabutan kebijakan tersebut ditujukan oleh Tony Abbott untuk memulihkan daya saing di sektor pertambangan, dimana pada saat itu terjadi cooling of the mining boom yakni penurunan aktivitas dan produktivitas dalam sektor pertambangan Australia.

Tabel 1.1 Prakiraan Produksi Batubara Australia (2009 - 2017)

	2009	2010	2011	2012e	2013f	2014f	2015f	2016f	2017f
Coal, mmt ¹	420	420	395	415	429	447	456	456	468
% change y-o-y	3.1	4.2	-4.5	5.0	3.3	4.2	2.0	0.4	2.2

e/f = BM estimate/forecast; ¹ Includes both coking and thermal coal production. Source: BMF E&I

Sumber: (Ministerstvo zahraničníc věcí, 2013)

Tony Abbott di sisi lain membuat kebijakan *Direct Action Plan* (DAP) sebagai alternatif dalam menggantikan kebijakan carbon tax. DAP merupakan pemberian insentif langsung untuk menurunkan emisi melalui *Emissions Reduction Fund* (ERF) tanpa mengenakan pajak baru. Program ini menyediakan pendanaan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan mengurangi emisi. Kebijakan DAP bersifat sukarela, sehingga tidak mewajibkan perusahaan untuk menurunkan emisi secara langsung, melainkan mendorong mereka yang bersedia berpartisipasi dengan insentif. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai DAP dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut memiliki intensitas yang ringan dan tidak mengikat kepada target, sehingga efektifitas dari kebijakan tersebut tidak dapat terjamin dan diawasi kerangka pengawasan kebijakan tersebut. Kebijakan DAP sebagai pengganti *carbon tax* mendapat beberapa kritik dan menjadi salah satu kebijakan kontroversial Tony Abbott yang lain, salah satu kritik diberikan oleh Turnbull dimana kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya yang terlihat seperti peduli terhadap lingkungan, tetapi sebenarnya hanya dilakukan untuk menutupi niat untuk tidak bertindak apa-apa (Crowley, 2021).

Kebijakan lain yang sangat dikritik oleh grup lingkungan, salah satunya adalah pencabutan pendanaan *The Climate Council*, organisasi independen yang memberikan informasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya di Australia. *Climate Council* yang didanai oleh *Climate Commission* dicabut dananya oleh Tony Abbott dengan alasan untuk menghemat biaya dan untuk merampingkan proses pemerintahan. Untuk melanjutkan keberlangsungannya, organisasi ini kemudian didanai lagi oleh bantuan donasi publik. Sebagai respon, mereka mengkritik bagaimana pencabutan pendanaan karbon itu memundurkan Australia dalam menangani perubahan iklim dan berpendapat bahwa mencabut pajak karbon akan menghancurkan target *low-carbon economy* Australia. Tidak hanya itu, Greenpeace Australia Pacific, grup lingkungan yang mengkampanyekan bagaimana mencabut pajak karbon lalu mempromosikan bahan bakar fosil dibandingkan energi terbarukan (*renewable energy*) akan merusak lingkungan, reputasi Tony Abbott serta juga Australia sebagai pemimpin perubahan iklim (McDonald, 2021).

Selain dari kontroversi terkait lingkungan, kebijakan luar negeri lainnya yang diterapkan Tony Abbott yang menyangkut perekonomian Australia tidak lain adalah keputusan Australia untuk membuka kembali keran ekspor uranium khususnya untuk India. Motif yang diyakini terkait alasan Tony Abbott untuk tetap melakukan ekspor uranium adalah untuk memperkuat dan mempertahankan posisi Australia di kawasan Indo-Pasifik dan juga wilayah Samudra Hindia. Selain itu, bagi Australia, kerjasama melalui penjualan uranium ini merupakan peluang besar karena dapat meningkatkan perekonomian Australia dari sektor pertambangan sekaligus memperkuat kemitraan strategis kedua negara dalam Australia-India Strategic Partnerships. Perlu diketahui bahwa India menolak untuk meratifikasi *Non-Proliferation Treaty* (NPT), yaitu perjanjian yang melarang negara tanpa senjata nuklir untuk memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. Sedangkan, uranium merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan nuklir.

Bagi masyarakat dunia dan masyarakat Australia, keputusan untuk mengeksport uranium ke India menjadi salah satu hal yang kontroversial karena terdapat banyak pro dan kontra di dalamnya. Keputusan tersebut melahirkan kekhawatiran dunia terkait implikasi dalam

keamanan dan etika dalam penjualan uranium karena tidak adanya keterikatan terhadap NPT serta risiko terhadap potensi proliferasi nuklir. Selain itu, pembukaan akses ekspor uranium ke India juga dilakukan pada saat yang sama dimana Australia menutup pintu ekspor uranium ke Rusia dengan alasan bahwa Rusia sedang mengalami ketegangan hubungan dengan Ukraina pada saat itu. Akibatnya, Australia mendapatkan tuduhan dari komunitas internasional dengan melakukan diskriminasi pembeli kepada Rusia karena India juga memiliki senjata nuklir sama halnya dengan Rusia (Wardani, 2017).

Latar Belakang Kehidupan Pendidikan

Tony Abbott pada tahun 1966 hingga 1975 bersekolah di St. Aloysius dan St. Ignatius College Riverview yang berlokasi di Sydney. Tony Abbott bertemu dengan Emmet Costello di Riverview. Costello merupakan seorang pastor yang menyarankan Tony Abbott untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang pastor, namun pada saat itu Tony Abbott belum memiliki keyakinan untuk menjadi seorang pastor. Pada tahun 1972, Tony Abbott mulai memiliki ketertarikan pada politik ketika ia berada di kelas sembilan. Pada saat itu, Tony Abbott mendapat tugas untuk membuat esai terkait partai-partai yang mengikuti pemilihan umum. Melalui tugas ini, Tony Abbott menonton orasi kebijakan yang akan diusung oleh partai-partai yang mengikuti pemilihan umum.

Tony Abbott belajar ilmu hukum dan ekonomi di Universitas Sydney pada tahun 1976. Pada saat menjadi mahasiswa di Universitas Sydney, Tony Abbott mulai berpolitik melalui *Democratic Club* yang merupakan jaringan antar kampus yang didirikan dan dibimbing langsung oleh *National Civic Council* (NCC). Dalam *Democratic Club* ia memulai debutnya sebagai jurnalis yang membahas homoseksual, dan lesbian. Tony Abbott juga aktif dalam berorganisasi, ia menjadi delegasi universitas untuk *Australian Union of Students* (AUS) dan menjadi ketua *Students' Representative Council* (SRC) pada 1978. Tony Abbott mendapatkan gelar Bachelor of Art di bidang ekonomi pada tahun 1979 dan di bidang hukum pada tahun 1981.

Setelah lulus, Tony Abbott melanjutkan studi S2-nya di Oxford melalui program beasiswa Rhodes. Disana ia mempelajari ilmu filsafat, politik, dan ekonomi. Selama berkuliah di Oxford, Tony Abbott bertemu dengan Paul Mankowski

yang merupakan seorang calon pastor Jesuit dari Amerika. Dengan pengaruh Mankowski, setelah lulus dari S2-nya pada tahun 1984 Tony Abbott memutuskan untuk kembali ke Australia dan mengikuti pelatihan pastor di sekolah seminari St. Patrick di Manly. Selama mengikuti pelatihan pastor ini, Tony Abbott sering menulis artikel untuk media *The Bulletin* dan *The Catholic Weekly*. Tony Abbott hanya bertahan mengikuti pelatihan ini selama tiga tahun karena menurutnya keyakinan religiusnya kurang mendalam untuk menjadi seorang pastor (Wardani, 2017).

Karir

Setelah lulus dari universitas, Tony Abbott memulai karir yang akhirnya membawanya menjadi salah satu politisi paling berpengaruh di Australia. Dia memulai karir jurnalistiknya di majalah *The Bulletin*, dimana dia menulis tentang politik, bisnis, dan kejadian kekinian. Pengalaman pertamanya tidak hanya memperluas pengetahuannya, namun juga memberinya perspektif unik untuk mempelajari dan menganalisis kompleksitas masyarakat Australia dan perubahan kondisi politiknya. Pengalaman ini membantu Abbott memperoleh ketajaman observasi dan pemikiran yang kritis, yang berkontribusi terhadap masa depannya.

Ketika minatnya pada politik tumbuh, Abbott dengan lancar berpindah ke posisi penasihat di Partai Konservatif. Bekerja sama dengan para pemimpin yang berpengaruh seperti John Hewson dan Peter Coleman yang menyempurnakan bakat politiknya dan memperoleh pengetahuan penting tentang pembuatan kebijakan dan taktik komunikasi. Posisi-posisi ini tidak hanya mempertajam kemampuan Abbott untuk melintasi kerangka legislatif yang rumit, namun juga memantapkan dirinya dengan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik melalui perencanaan strategis dan partisipasi publik. Hal ini penting dalam perkembangan profesional Abbott karena memberikan landasan bagi karirnya yang mencakup berbagai aspek politik Australia.

Tony Abbott membuat kemajuan besar lainnya dalam politik federal pada tahun 1994, ketika ia terpilih sebagai Anggota Parlemen Warringah di Sydney. Kenaikan pesatnya di Partai Liberal sungguh luar biasa. Abbott menjabat di berbagai jabatan menteri di kabinet John Howard, termasuk Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kesehatan dan Penuaan, menunjukkan etos kerja dan

kemampuan kepemimpinannya. Selama masa jabatannya, ia berperan penting dalam menetapkan kebijakan-kebijakan besar yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi melalui kerjasama *free trade agreement* dengan beberapa negara, salah satunya Tiongkok (Santoso, 2020). Peristiwa kontroversial terjadi pada tahun 2009, ketika Abbott memenangkan pemungutan suara kepemimpinan melawan Malcolm Turnbull, menjadi pemimpin Partai Liberal dan pemimpin Oposisi. Dia kemudian memimpin partai koalisinya meraih kemenangan pada pemilihan umum tahun 2013, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Australia. Sebagai Perdana Menteri, Abbott mencetuskan sejumlah kebijakan, yang sebagian besar berfokus pada langkah-langkah keamanan perbatasan seperti Operasi Perbatasan Kedaulatan, yang bertujuan untuk mengurangi kedatangan pencari suaka, serta program penghematan fiskal yang dirancang untuk meningkatkan disiplin keuangan dalam menghadapi meningkatnya pengungsi. Meskipun menghadapi perbedaan pendapat di internal partai serta meningkatnya kritik eksternal, khususnya mengenai sikap perubahan iklim dan persepsi inkonsistensi di dalamnya, ia tetap menjadi tokoh berpengaruh hingga akhirnya digantikan oleh Malcolm Turnbull pada bulan September 2015, menandai berakhirnya sebuah bab dengan dampak besar yang tidak akan terhapuskan (Frew, 2015).

Mentor

Pastor Emmet Costello merupakan seorang pendeta dan pendidik Jesuit yang memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia dan filosofi politik Tony Abbott (Duffy, 2009). Sebagai pendeta Abbott di St Ignatius' College, Costello menanamkan dalam dirinya etos Jesuit untuk menjadi "manusia bagi orang lain", yang menekankan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini sangat bergema di benak Abbott dan menjadi prinsip panduan sepanjang hidup dan karirnya. Abbott termotivasi oleh pelajaran Costello untuk memiliki keingintahuan intelektual yang luas, memotivasi siswa untuk membaca secara ekstensif dan terlibat secara kritis dengan sejarah dan sastra. Ia sering menyoroti pentingnya mempelajari sejarah budaya seseorang, dengan ungkapan terkenalnya, "*genus humanum vivit paucis*," atau "umat manusia hidup hanya dengan sedikit orang." Sudut pandang ini

mengajarkan Abbott untuk menghargai teks-teks dasar dan kerangka moral yang telah membangun budaya Barat, khususnya Perjanjian Baru, yang dianggap penting untuk memahami sifat dan etika manusia (Tonyabbott.com, 2024).

Pada tahun awal Abbott di bawah pengawasan Pastor Costello dibedakan oleh fokusnya pada studi akademis yang ketat yang dipadukan dengan pedoman moral berdasarkan prinsip-prinsip Kristen. Ketertarikan Costello pada sejarah dan biografi mendorong Abbott untuk menyelidiki kehidupan orang-orang terkemuka, menanamkan rasa ambisi dan janji. Dorongan untuk tidak membatasi apa yang dapat dicapai mempunyai dampak yang signifikan terhadap tujuan pribadi dan politik Abbott. Dia sering berkomentar tentang bagaimana pelajaran awal ini mempengaruhi karirnya, di mana dia ingin menerapkan keyakinan ini dalam pelayanan publik. Pendidikan Jesuit yang diterimanya menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan masyarakatnya.

Abbott secara teratur menggunakan cara pandang Pastor Costello untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang rumit. Ketaatannya pada cita-cita konservatif dapat ditelusuri kembali ke kerangka moral yang ia kembangkan selama pendidikannya. Misalnya, penekanan Abbott pada identitas nasional dan pemerintahan mengikuti penanaman pemahaman sejarah oleh Costello dalam dirinya. Landasan ini memungkinkan Abbott melintasi medan politik dengan tujuan yang jelas, mengkampanyekan undang-undang yang mencerminkan keyakinannya pada tanggung jawab individu dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, bimbingan Abbott dari Pastor Costello membantunya mengembangkan ketekunan dalam menghadapi masalah politik. Fokus Jesuit pada integritas moral dan pelayanan memperkuat keyakinannya untuk tetap berpegang pada prinsipnya bahkan ketika menghadapi perlawanan. Sepanjang masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Abbott sering menerapkan prinsip ini, mendasarkan kebijakannya pada cita-cita patriotisme dan kesejahteraan komunal. Gaya kepemimpinannya ditentukan oleh kombinasi keyakinan dan pragmatisme, kualitas yang ia kaitkan dengan pengaruh mentornya Costello.

Pengajaran Pastor Emmet Costello berdampak signifikan terhadap konsep politik dan pelayanan publik Tony Abbott. Pemikiran politik Abbott didasarkan pada kombinasi kepemimpinan

moral, ketelitian intelektual, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Seiring kemajuan karirnya dari jurnalisme hingga pemerintahan tingkat tinggi, prinsip-prinsip ini tetap penting bagi identitasnya sebagai pemimpin yang berdedikasi untuk membantu Australia sambil mempertahankan cita-cita konservatif berdasarkan pemahaman sejarah dan tanggung jawab sosial.

Analisis Hubungan Kebijakan Luar Negeri dengan Karakteristik Kepemimpinan

Secara umum, pencabutan *Carbon Tax* dan *Climate Council* oleh Abbott didasari oleh tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Australia. Sejalan dengan kampanyenya untuk mengurangi peran pemerintah dalam permasalahan lingkungan, Tony Abbott mencabut pendanaan terhadap *Climate Council* pada tahun 2013. Dengan melakukan pencabutan dana ini, Abbott berusaha untuk mengurangi pengeluaran pemerintah sekaligus memuluskan jalannya untuk mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil. Keputusan ini memperlihatkan karakter Abbott yang cenderung aktif dengan tidak hanya melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, melainkan dengan membuat perubahan arah kebijakan perekonomian Australia.

Berdasarkan pengalamannya sebagai jurnalis *The Bulletin* sekaligus kementerian yang berkaitan dengan ekonomi negara, Abbott mampu mempertajam pengamatan dan intuisinya mengenai kondisi ekonomi selama masa pemerintahannya. Selama periode tersebut, Tony Abbott menyadari bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan pendapatan negara dari tambang sebagai bentuk berakhirnya periode mining boom yang mencapai puncaknya di tahun sebelumnya. Padahal, sektor industri tambang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Australia. Berdasarkan data statistik dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, sektor pertambangan berkontribusi pada penerimaan ekspor negara dengan nilai ekspor tertinggi pada penjualan bijih dan konsentrat besi sebesar 20% dan batubara sebesar 11% dari seluruh pendapatan ekspor negara di tahun 2014. Dengan kontribusinya yang begitu besar bagi perekonomian negara, penurunan pendapatan industri tambang tentu tidak luput dari perhatian Abbott. Dengan pengalamannya berkarir di sektor ekonomi beserta sifat konservatifnya, Abbott memutuskan untuk membantu industri

tambang dengan mencabut kewajiban pajak karbon.

Kebijakan Abbott yang menunjukkan keterkaitan dengan nilai-nilai moral serta pemikiran politik yang diadopsinya dan menuai perhatian luas yang pertama adalah *Direct Action Plan*, sebuah kebijakan yang berusaha menurunkan emisi karbon melalui insentif pajak langsung terhadap perusahaan. Melalui kebijakan ini, Abbott memberikan kelonggaran kepada perusahaan dengan menyediakan insentif bagi proyek yang dapat mengurangi emisi karbon, dibandingkan dengan pendekatan pajak karbon yang dianggap lebih membebani sektor bisnis (Crowley, 2017). Meskipun kebijakan ini tidak sepenuhnya buruk, namun memiliki konsekuensi yang besar, terutama pada potensi dampak jangka panjang terhadap lingkungan yang mungkin tidak sepenuhnya terserap dalam insentif yang diberikan.

Nilai yang mendasari kebijakan *Direct Action Plan* dapat dilihat dari pendekatan Abbott yang berpijak pada prinsip tanggung jawab sosial dan kepemimpinan moral yang ia pelajari dari mentor konservatifnya, Pastor Costello. Abbott memiliki visi pragmatis, yang berusaha menyeimbangkan antara menjaga daya saing bisnis dan memenuhi tanggung jawab sosial, namun menunjukkan kecenderungan kuat ke arah kebijakan pro-bisnis. Meski berkomitmen pada tanggung jawab sosial, kebijakan seperti *Direct Action Plan* seringkali mengorbankan aspek lingkungan dalam jangka panjang. Sebagai pemimpin dengan fokus utama pada efisiensi ekonomi dan keberlangsungan sektor bisnis, Abbott seringkali mengabaikan aspek yang kurang menguntungkan bagi industri, seperti perubahan iklim, yang membuat kebijakannya banyak dikritik sebagai kebijakan yang tidak ramah lingkungan (Hurcombe, 2016). Adapun dampak dari peralihan kebijakan pajak karbon ke *Direct Action Plan* ini yaitu merenggangnya hubungan antara Australia dengan Amerika, Cina, dan negara-negara Asia yang tergabung dalam Protokol Kyoto. Padahal, sebelumnya hubungan Australia dengan negara-negara tersebut pada masa pemerintahan Kevin Rudd terjalin cukup baik, mengingat Rudd senantiasa menunjukkan perhatiannya pada persoalan iklim (Fahmi, 2018).

Kecenderungan Abbott pada bidang ekonomi dan kurang memprioritaskan sektor lingkungan juga diperjelas melalui pidato dan sikap politiknya dalam konferensi G20 tahun 2014

yang diadakan di Brisbane, Australia. Perlu untuk diketahui bahwa pada tahun tersebut, Australia masih dibayangi dampak dari krisis 2008 karena masih memiliki kewajiban membayar hutang dan tingginya angka pengangguran di Australia. Dengan kondisi demikian, fokus pembahasan pada konferensi ini cenderung kepada upaya penguatan ekonomi global, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan dari penyalahgunaan pajak. Adapun rapat ini juga turut membahas perkembangan dari ketegangan hubungan antara Rusia dan Ukraina yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas perekonomian global. Akan tetapi, isu perubahan iklim yang pada saat itu banyak menjadi perbincangan justru hanya menjadi agenda sampingan pada pertemuan ini. Hal ini merupakan salah satu keputusan yang sejalan sikap politik dari Abbott yang secara tegas menegaskan bahwa fokusnya adalah pada isu terpenting pada saat itu, yaitu pemulihan ekonomi, bukan pada kondisi yang kemungkinan baru akan terjadi 16 tahun mendatang yang mengacu pada isu perubahan iklim. Sikap ini lagi-lagi mendapatkan kritik dari AS dan Cina yang telah sepakat untuk mengatasi isu perubahan iklim (Wahyudi, 2014).

Peran aktif Abbott dalam membuat kebijakan yang direspon secara negatif juga terjadi ketika Australia kembali menjual uranium, yang merupakan bahan dasar pembuatan nuklir, ke India setelah sebelumnya dilarang oleh parlemen Canberra. Australia yang menguasai 40% dari seluruh cadangan uranium di dunia menilai bahwa India merupakan calon mitra strategis karena memiliki kebutuhan energi yang meningkat dengan cepat dan tengah berupaya meningkatkan kapasitas nuklirnya untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mengejar target penggunaan energi terbarukan. Mengenai kebijakan ini, Abbott berpendapat bahwa India merupakan negara yang dapat dipercaya karena memiliki catatan non-proliferasi yang cukup baik karena tidak pernah menjual, menukar, atau memberikan teknologi nuklir kepada negara lain. Dengan melihat ekspor ini sebagai instrumen kerjasama strategis bilateral sekaligus untuk mendukung sektor pertambangan negara, kebijakan ini merupakan kebijakan yang menunjukkan sisi pragmatisme dari Tony Abbott. Dalam merumuskan kebijakan ini, terlihat bahwa Abbott lebih berfokus sisi kebermanfaatannya di bidang ekonomi agar Australia dapat meningkatkan pendapatannya melalui ekspor Uranium daripada berfokus pada aspek legal atau

ideologi proliferasi untuk mencegah bertambahnya jumlah negara yang memiliki senjata nuklir.

SIMPULAN

Melalui beberapa kebijakan luar negeri di bidang ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tony Abbott merupakan pemimpin yang memiliki sifat konservatif dan pragmatis yang berpegang teguh pada prinsip tanggung jawab sosial dan cinta tanah air. Karakter tersebut tercermin dari kebijakannya yang cenderung mengabaikan isu global yang tidak sejalan dengan visinya dan lebih memperhatikan aspek perekonomian negara. Dalam hal ini, sifat konservatif yang dimilikinya terlihat dalam kebijakannya yang memprioritaskan nilai-nilai tradisional seperti stabilitas ekonomi dengan bantuan bahan bakar fosil dan mengabaikan isu kontemporer seperti perubahan iklim dan non-proliferasi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, cukup terlihat bahwa Abbott merupakan pemimpin yang aktif dalam membuat kebijakan luar negeri, bahkan berani untuk tetap melaksanakan kebijakan tersebut meskipun mendapatkan kecaman dari berbagai aktor lain. Namun, terlepas dari aspek manfaat jangka pendek kebijakannya, banyaknya respon negatif yang diterima juga menunjukkan bahwa Abbott merupakan pemimpin yang memiliki karakter aktif-negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade. (26 November 2015). *Australia's trade and economic statistics in 2014*. Diakses 06 Desember 2024, dari <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-at-a-glance-2015/Pages/profile-of-australias-trade-in-2014#:~:text=In%202014%20Australia's%20total%20goods,prices%20fell%203.7%20per%20cent>
- Australia Mining Report (2014).. *Business Monitor International*. Diakses 03 Desember 2024, dari https://mzv.gov.cz/file/1033799/australia_mining_report_q3_2013.pdf
- Akkaya, Sahin; Bakkal, Ufuk (2020). "Carbon Leakage Along with the Green Paradox Against Carbon Abatement? A Review Based

- on Carbon Tax" Commonwealth of Australia. "Final Budget Outcome 2014–15"
- Ba, A.D. (2017). *In pursuit of Asian Infrastructure Investment Bank: The politics and geopolitics of a Chinese bank. In Regional Institutions, Geopolitics and Economics in the Asia-Pacific (pp. 27-45).* Routledge.
- Callaghan, M., & Hubbard, P. (2016). The Asian infrastructure investment bank: Multilateralism on the silk road. *China Economic Journal*, 9(2), 116-139.
- Crowley, K. (2017). Up and down with climate politics 2013–2016: the repeal of carbon pricing in Australia. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(3), e458.
- Crowley, K. (2021). Fighting the future: The politics of climate policy failure in Australia (2015–2020). *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12(5), e725.
- Department of Climate Change (2013). "Starting Emissions Trading on 1 July 2014 Policy Summary"
- Duffy, M. (2009). The missing element of self-doubt.
- Hernoko, A.Y. (2008). *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Econofac.org (3 Mei 2019). *Carbon Taxes: What Can We Learn From International Experience?*. Diakses 1 Desember 2024, dari <https://econofact.org/carbon-taxes-what-can-we-learn-from-international-experience>
- Hurcombe, E. (2016). The making of a captain: The production and projection of a political image on the Tony Abbott Facebook page. *Communication, Politics & Culture*, 49(1), 19-38.
- Goode, R & McKendrick E (2016). *Goode on Commercial Law*. United Kingdom: LexisNexis Butterworths.
- Grattan, M. (2016). Anthony John Abbott. In *Australian Prime Ministers: Revised and Updated Edition*, 511 - 520.
- Kompas.com (16 Mei 2019). *APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*. Diakses pada 13 Oktober 2024, dari https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa#google_vignette
- Lee, P. K., & Carr, A. (2022). Australia's Great-
Kebijakan Luar Negeri Australia Di Bidang Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott
 (Rahmat Iskandar, Andreas Hari Kristiyanto, Rahma Atridayana Dwanti, Saniyyah, Muhammad Nadhifa Ar Rafii)
- Power Threat Perceptions and Leadership Responses. *Asia policy*, 17(4), 77-99.
- McDonald, P. (2021). Climate council: 'Too late to limit warming to 1.5 degreesC'. *Green Left Weekly*, (1308), 10.
- Parliamentary Library. Hewson, Dr John Robert. Parliamentary Handbook online.
- Parliamentary Library. Howard, the Hon John Winston, AC. Parliamentary Handbook online.
- Parliamentary Library. Hockey, the Hon Joseph (Joe) Benedict. Parliamentary Handbook online.
- Parliamentary Library. Morrison, the Hon Scott Paul. Parliamentary Handbook online.
- Ravenhill, J. (1994). Australia and the global economy. *State, economy and public policy in Australia*, 75-97.
- Simpson, K. (2015). Issues in Australian Foreign Policy. *Australian Journal of Politics and History*, 61(4), 606-617.
- Theguardian.com (16 Mei 2014). *Massive uni fees: higher interest rate will hit poorer students, Greens say*. Diakses 03 Desember 2024, dari <https://www.theguardian.com/world/2014/may/16/massive-uni-fees-coalition-adviser-says-fears-over-degree-costs-are-exaggerated>
- Treitel, G. H. (2003). *The Law of Contract*. United Kingdom: Thomson Carswell.
- Walsh, M. (2017). First above equals? Assessments of the Abbott Prime Ministership 2013–2015. *Australian Journal of Political Science*, 52(3), 465-480.
- Wardani, A. (2017). Kebijakan Tony Abbott Sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015). *Risalah*, 4(5).